

**PEMBANGUNAN PERTANIAN :
ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN**

Oleh: Sapto Husodo

ABSTRACT

The agricultural sector has the heavy burden of being perceived as levers of national economic growth. As a consequence to pursue short-term interests of many agricultural development practices carried out by ignoring the preservation aspects of natural resources. These conditions raise awareness about the importance of conserving natural resources as a factor of production increase agricultural productivity. Agricultural development should be directed through the right strategy with not merely the pursuit of economic growth, but by taking into account aspects of sustainability of agricultural resources. Therefore, it is time for the government continuously campaign and implement approaches to agricultural development that is integrated, environmentally friendly, efficient, sustainable, future-oriented and long-term.

Keywords : *agricultural development, economic growth, natural resources, sustainability.*

PENDAHULUAN

Istilah pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Konsep pertumbuhan ekonomitersebut sering dijadikan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Para ekonom pada umumnya memberikan pengertian yang sama mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak (Arsyad 1999).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan, sumber

daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas, budaya terutama budaya positif suatu bangsa, dan sumber daya modal. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk. Hal ini menggambarkan bahwa berbagai perubahan dalam pertumbuhan penduduk perlu menjadi pertimbangan, karena jika suatu kenaikan pendapatan nyata yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka akan terjadi kemunduran ekonomi (Tarigan, 2004).

Sementara itu pembangunan ekonomi

adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan lebih melihat kepada target, sedang pembangunan melihat prosesnya. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi (Sukirno, 2006). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran

Sebagai negara berkembang Indonesia masih menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai jargon pembangunan nasional. Namun meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukannya tanpa masalah. Banyak negara dunia ketiga yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Hal ini dapat dipahami mengingat konsep pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan dan penambahan penduduk, Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan yang lebih penting lagi pertumbuhan ekonomi

belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Karena itulah perlu upaya-upaya peningkatan kesejahteraan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga menjamin pemenuhan hak-hak hidup bagi generasi yang akan datang.

Dalam konteks pembangunan nasional, sektor pertanian mendapatkan beban cukup berat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena perannya yang sangat penting dan menentukan baik dalam persoalan pangan maupun ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) menguatkan penjelasan tersebut, di antaranya pada Februari 2014, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 40,83 juta orang dan dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 41,11 juta orang. Dikatakan, sektor yang mencapai pertumbuhan teratas pada semester kedua tahun 2015, yaitu dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan porsi 10,09%, sementara pada kuartal ke-2 pertumbuhan ekonomi baru mencapai 4,67%.

Dewasa ini beban sektor pertanian kian berat. Sektor ini tidak hanya menanggung surplus tenaga kerja tapi juga pendapatan dan daya beli pekerja. Selain itu karena alasan pertumbuhan ekonomi sektor ini dituntut harus mampu mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian untuk kepentingan pangan, menambah devisa negara maupun bahan baku industri. Untuk memenuhi capaian-capaian PDB, penyerapan tenaga kerja ataupun peningkatan nilai ekspor sektor pertanian terkadang dijadikan sebagai “tumbal” pembangunan ekonomi terutama dalam

hal kurangnya perhatian terhadap kelestarian sumberdaya alam sebagai faktor produksi utama peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Ironisnya telah banyak diketahui kondisi pertanian di negara-negara berkembang mempunyai produktivitas yang rendah, dengan jumlah petani yang sangat banyak serta belum terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh penduduk negara. Rendahnya pertumbuhan output pertanian tersebut disebabkan oleh faktor iklim, lahan garapan petani semakin kecil, kualitas SDM rendah dan penggunaan teknologi rendah. Sementara pertanian di negara-negara maju sangat efisien, yakni tingginya produktivitas yang memungkinkan jumlah petani sedikit tetapi dapat menyediakan pangan bagi seluruh penduduk negara.

Selain itu eksploitasi sumberdaya lahan pertanian di negara berkembang terkadang dilakukan secara kurang bijaksana karena dilakukan melebihi daya dukungnya. Sebagai akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup antara lain degradasi lahan, kebakaran hutan, rusaknya sumberdaya hayati dan sebagainya sebagai akibat perluasan areal pertanian yang tidak terkendali secara optimal.

DILEMA TRADE OFF

Tujuan akhir pembangunan ekonomi yaitu tercapainya kesejahteraan penduduk antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya

perekonomian bangsa, maka di masa depan Indonesia akan dikembangkan menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian akan menjadi *the leading sector*.

Dalam proses menuju transformasi struktural permasalahan di sektor pertanian muncul terutama dalam upaya meningkatkan jumlah produksi pangan. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Semakin besarnya perkembangan penduduk membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri dan pembangunan infrastruktur juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang. Selain itu tingkat produktivitas pertanian per hektar juga relatif *stagnan*. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada rusak dan perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.

Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Suatu saat mungkin saja Indonesia akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan

pangan, terutama karena semakin mudahnya produk pertanian yang berasal dari luar negeri, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, pertanyaannya, kemana arah sebenarnya struktur perekonomian Indonesia akan dibawa, dan bagaimana strategi pembangunan pertanian diterapkan untuk dapat menjamin terjaganya keberlanjutan sumberdaya alam yang merupakan titipan anak cucu?

Dinamika dalam penggunaan dan pengelolaan lahan berlangsung sangat cepat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam hal ini orientasi ekonomi lebih banyak mendominasi yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek sehingga fungsi lingkungan lahan pertanian mungkin akan berkurang atau justru hilang.

Pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan salah satunya sebagai fungsi produktivitas pangan di satu sisi dan keberlanjutan di sisi lain adalah sebuah dilema *trade off*. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam termasuk pembangunan sektor pertanian yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena terbatasnya kapasitas sumberdaya lahan.

Dengan alasan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Ketika pertumbuhan ekonomi akan didorong, lingkungan dapat mengalami

penurunan kualitas. Hal ini terjadi terutama disebabkan kalau upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan secara kurang bijaksana yang melebihi daya dukung lahan. Pertanyaannya, mana yang lebih diutamakan, peningkatan produksi untuk mendukung pertumbuhan atau keberlanjutan sumberdaya alam?

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan pertanian khususnya di sub sektor perkebunan kelapa sawit merupakan contoh konkret mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi dengan mengabaikan kelestarian sumberdaya alam. Pembangunan perkebunan komoditas ini telah menghasilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan Indonesia karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi.

Kurang cermatnya praktek-praktek penyelenggaraan pembangunan di lapangan ditambah dengan lemahnya penegakkan hukum memunculkan berbagai masalah yang pada akhirnya sulit dikendalikan. Misalnya saja program sawit di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan seluas 1,8 jt ha dan Program Biofuel 6 juta ha. Program ini tentu saja sangat diminati investor, karena lahan peruntukan kebun yang ditunjuk pemerintah adalah wilayah hutan. Sebelum mulai berinvestasi saja para investor sudah bisa mendapatkan keuntungan

besar berupa kayu dari hutan dengan hanya mengurus surat Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada pihak pemerintah.

Sebagai akibat terjadinya deforestasi di atas antara lain adalah hilangnya keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan hujan tropis, hilangnya budaya masyarakat di sekitar hutan, dan berubahnya jutaan hektar areal hutan konversi menjadi lahan terlantar berupa semak belukar dan/atau lahan kritis baru. Sementara itu perluasan perkebunan kelapa sawit yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai devisa yang akan diperoleh berbalik menjadi tragedi dan bencana yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit nilainya.

Sebuah studi yang mengungkap hubungan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan dilakukan oleh Waluyo (2004) yang menyatakan bahwa hubungan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan. Pendapat ini diperkuat oleh temuan Wahyuni (2004) yang menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan mempunyai hubungan yang negatif artinya jika pertumbuhan ekonomi naik maka ketidakmerataan pendapatan akan turun.

KONSEP PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah sejak lama menjadi perhatian para ahli. Istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru

muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat sebagai akibatnya dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Dari sisi ekonomi setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. *Pertama* menyangkut alasan moral. Alasan moral ini dilandasi kesadaran pentingnya generasi saat ini memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang.

Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan dan berpeluang menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. *Kedua*, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. *Faktor ketiga*, adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui

apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan. Akan tetapi ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi secara maksimum.

Bagaimana cara hal ini dapat dilakukan? Pemerintah tentunya memerlukan strategi kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan disertai dengan sistem pengendalian yang tepat. Eksploitasi sumber daya alam disarankan sebaiknya pada sumber daya alam yang *replaceable* atau tergantikan sehingga ekosistem atau sistem lingkungan dapat dikendalikan.

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan sawah untuk tujuan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pangan sering terkesan kontradiktif dengan upaya pelestarian sumber daya alam, khususnya lahan sawah. Kegiatan tersebut seharusnya dilakukan tanpa merusak lingkungan, atau setidaknya diupayakan agar keseimbangan antara kedua komponen tersebut dapat mendekati

kondisi ideal. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, keseimbangan antara kondisi ekologi dan ekonomi dapat dicapai dengan menerapkan aspek ekonomi sebagai instrumen yang mengatur alokasi sumber daya alam secara rasional. Dalam hal ini kebijakan dalam penggunaan dan pengelolaan lahan akan menjadi lebih efisien dan efektif jika secara ekonomi diketahui nilai lahan tersebut dalam satuan moneter, baik nilai produksi barang dan jasa maupun nilai lingkungan yang dihasilkan.

Mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan.

Menghadapi dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis, potensi perekonomian yang semula didominasi oleh sumber daya energi dan bahan baku asal fosil dituntut untuk dilakukan transformasi menjadi berbasis bahan baku baru dan terbarukan utamanya bahan baku hayati. Era revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi industri dan revolusi teknologi informasi berbasis bahan fosil telah berakhir dan digantikan oleh era revolusi bio ekonomi yang digerakkan oleh revolusi bioteknologi dan bioengineering yang mampu menghasilkan biomassa sebesar-besarnya untuk kemudian diolah menjadi bahan pangan, pakan, energi, obat-obatan, bahan kimia dan beragam bioproduk lain

secara berkelanjutan. Selain menjadi penghasil utama bahan pangan, pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahanbaku hidro-karbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini haruslahditransformasikan menjadi Revolusi Hayati (*Biorevolution*). Untuk itu, pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi Indonesia ialah pembangunan *Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan* (Kementan, 2015).

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang menggambarkan dinamika pembangunan ekonomi menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan pertumbuhan ekonomi saja belumlah cukup, lebih-lebih harga yang harus dibayar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut harus dengan mengorbankan fungsi lingkungan sebagai faktor produksi yang harus dijaga untuk menjaga keberlanjutan proses pembangunan.

Pembangunan sektor pertanian sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi harus diarahkan melalui strategi yang tepat dengan tidak semata-mata mengejar angka-angka pertumbuhan ekonomi tetapi dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya pertanian. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah terus menerus mengkampanyekan dan mengimple-mentasikan pendekatan-pendekatan pembangun-an pertanian yang integratif, ramah lingkungan,

efisien, berkelanjutan, berorientasi masa depan dan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keempat, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Sukirno, S. 2006. *Pengantar Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tarigan, R. 2004, *Ekonomi Regional Teori & Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Ketujuh), Erlangga, Jakarta.
- Wahyuni, H. 2004. *Is There A Link Between Increased Growth And Reduced Income Inequality? Analysis of Cross-Country Studies*. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, Februari.
- Waluyo, J. 2004. *Hubungan Antara Tingkat Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi : Suatu Studi Lintas Negara*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9 No. 1, Juni 2004. Hal: 1–20.